

# BAB 1

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Keamanan Nasional merupakan konsep yang sangat luas. Konsep Keamanan nasional tradisional atau pada masa sebelum Perang Dunia II diasosiasikan pada keamanan militer dan kedaulatan suatu negara. Oleh sebabnya studi keamanan sebelumnya berfokus pada mekanisme kebijakan luar negeri yang ditujukan untuk menghindari, mencegah, bahkan memenangkan sengketa militer antarnegara (Mahmud et al, 2009).

Seiring dengan terus berkembangnya bentuk-bentuk ancaman tradisional dan non-tradisional, keamanan manusia atau *human security* kemudian mulai diperhatikan terutama setelah perang dingin pada tahun 1990-an. Isu-isu yang mendorong eksistensinya yakni muncul berbagai konflik di banyak daerah (Mahmud et al, 2009). Konflik-konflik tersebut tidak hanya mengakibatkan korban jiwa, namun juga merampas hak warga sipil seperti pengusiran dari tempat tinggal, pemerkosaan, pemusnahan etnis (*ethnic cleaning*) dan kejahatan kemanusiaan lainnya. Seiring berjalannya waktu, konsep keamanan nasional meluas hingga kepada keamanan manusia, lingkungan, dan kemasyarakatan.

United Nation Development Programme (UNDP) melalui laporannya pada tahun 1994 melakukan klaim untuk pertama kalinya bahwa keamanan insani perlu menjadi rujukan sebagai dasar keamanan nasional. Klaim ini didukung oleh penurunan intensitas terjadinya perang di era 1990an. Konsep keamanan insani atau keamanan manusia (*human security*) menekankan setidaknya pada dua aspek. *Pertama*, keselamatan dari ancaman kronis dan mendasar seperti kelaparan, penyakit, dan penindasan hak asasi manusia. *Kedua*, keselamatan dari gangguan mendadak dalam kehidupan

sehari-hari. Untuk memastikan keamanan manusia terjamin, fokus negara perlu diubah menjadi perhatian terhadap manusia, kemudian keamanan melalui kerangka militer dan persenjataan menjadi keamanan melalui pembangunan manusia.

UNDP mengembangkan konsep keamanan insani terdiri dari empat karakter penting yakni universalisme, interdependensi komponen, langkah pencegahan dibanding perlindungan, dan terpusat pada pembangunan manusia. UNDP kemudian mengidentifikasi komponen dalam keamanan manusia yakni keamanan ekonomi (*economic security*), keamanan pangan (*food security*), keamanan kesehatan (*health security*), keamanan lingkungan (*environmental security*), keamanan pribadi (*personal security*), keamanan masyarakat (*community security*), dan keamanan politik (*political security*).

*“the threat of global poverty traveling across international borders in the form of drugs, HIV/AIDS, climate change, illegal migration and terrorism”* (UNDP, 1994)

. Memasuki tahun 2020, dunia dirundung dengan pemberitaan infeksi virus yang dimulai di Kota Wuhan, China. Virus tersebut dengan cepat menyebar ke negara-negara lain. Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) secara resmi telah menyatakan penyakit yang disebabkan oleh novel corona virus (n-CoV) ini sebagai darurat internasional pada 30 Januari 2020. WHO menetapkan Covid-19 sebagai pandemi pada 11 Maret 2020 menyusul kasus di luar China melonjak lebih dari 13 kali lipat dalam dua minggu, yakni 182.405 kasus yang tersebar di 155 negara sejak rilis pertama WHO terkait wabah virus n-CoV di China pada 21 Januari 2020. Alasan lainnya diungkapkan oleh Direktur Jenderal WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus menyebutkan bahwa WHO sudah selalu memberikan peringatan, namun beberapa negara tidak menunjukkan komitmen serius untuk mengontrol penyebaran virus tersebut di level politik

(Kompas.id, 18 Maret 2020). Kontrol di level politik yang dimaksud adalah kebijakan pemerintah yang ditujukan untuk memutus mata rantai penyebaran virus.

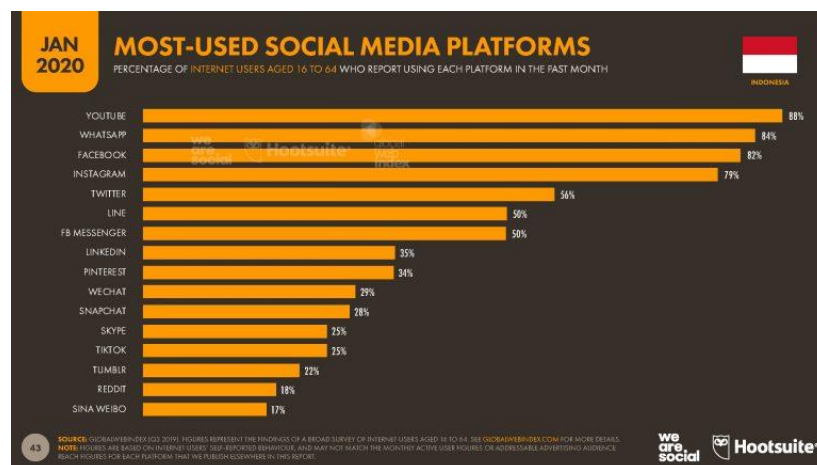
Virus corona dinilai telah menjadi ancaman serius bagi kesehatan publik secara global, yang mana termasuk ke dalam salah satu aspek dalam keamanan insani yakni keamanan kesehatan (*health security*). Di samping itu, berbagai aspek secara global seperti ekonomi dan sosial pun terancam dengan semakin meluasnya penyebaran virus yang diketahui masih berasal dari keluarga besar yang sama dengan SARS dan MERS – virus pandemi yang menggemparkan dunia beberapa tahun lalu. Sifat ancaman dan daya rusak virus yang multidimensi ini selain mengganggu keamanan manusia, juga menjadi gangguan keamanan publik dan negara (Utama, 2020).

WHO meminta pemerintah di tiap negara untuk mengambil tindakan darurat dan agresif. Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo pun mengambil langkah dengan mengimbau masyarakat Indonesia untuk bekerja, belajar, dan beribadah dari rumah untuk menekan laju penyebaran virus corona. Tindakan ini diambil menyusul lonjakan kasus setelah kasus pertama di Indonesia yang diumumkan langsung oleh Presiden Joko Widodo pada tanggal 2 Maret 2020. Selanjutnya, himbauan ini menjadi aturan resmi sebagai tindakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang diresmikan pada 31 Maret 2020 melalui Keputusan Presiden RI Nomor 11 Tahun 2020 dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020.

Pembatasan sosial membuat sebagian masyarakat menghabiskan sebagian besar waktunya berada di dalam rumah. Meski pada akhirnya pemerintah mengeluarkan kebijakan mengenai relaksasi PSBB dan transisi ke masa Adaptasi Kebiasaan Baru yang dimulai sejak Juni 2020, sebagian masyarakat memilih untuk tetap tinggal di rumah selama kegiatannya bisa dilaksanakan secara daring.

Media sosial tak urung menjadi sarana untuk mengisi keseharian di samping aktivitas yang bergeser menjadi berbasis daring. Apalagi akses terhadap informasi saat ini seolah menjadi kebutuhan primer seiring dengan masyarakat yang memasuki era informasi. Setidaknya terdapat 160 juta pengguna aktif media sosial di Indonesia (Kompas.id, 16 Juni 2020).

Tak dapat dipungkiri, penggunaan media sosial di Indonesia semakin meningkat guna mencari informasi terkini terkait Covid-19. Dalam Indonesian Digital Report 2020 yang dirilis oleh Hootsuite (We are Social) (2020), pengguna media sosial aktif di Indonesia sejumlah 160 juta orang. Dapat diartikan bahwa penetrasi pengguna aktif media sosial berjumlah 59 persen total populasi di Indonesia. Adapun *platform* media sosial paling aktif digunakan di Indonesia adalah Youtube, diikuti WhatsApp, Facebook, Instagram, dan Twitter.



**Gambar 1.1 Persentase Media Sosial Paling Aktif Digunakan di Indonesia**

Sumber: Hootsuite (We are Social), (2020)

Twitter menjadi salah satu *platform* media sosial yang paling aktif digunakan di Indonesia. Setidaknya pada laporan yang dirilis oleh Hootsuite (We are Social), 56% pengguna internet pada usia 16 sampai dengan 64 tahun tercatat menggunakan media sosial Twitter.

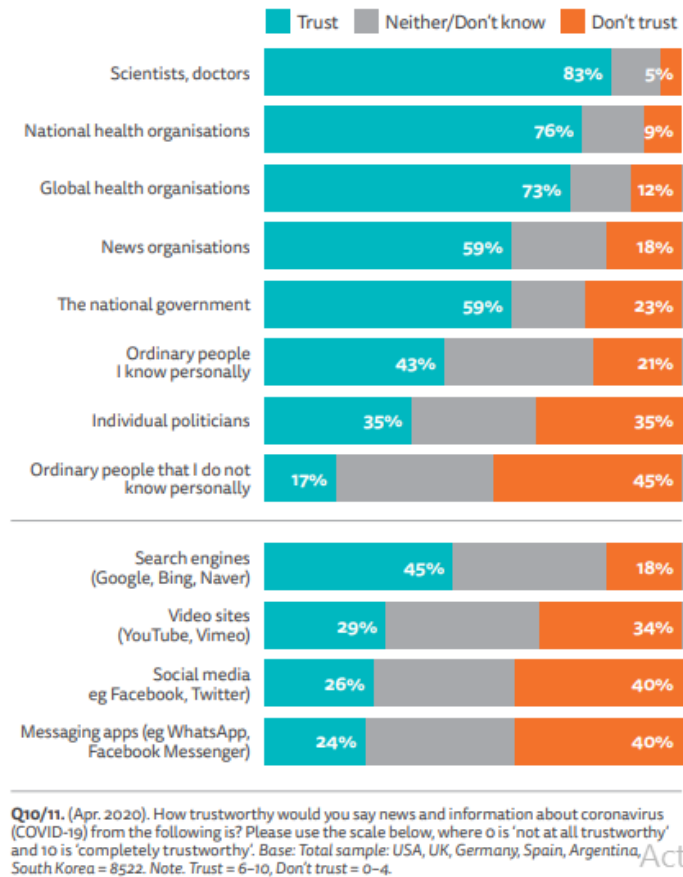
Melihat tren penggunaan media sosial terutama Twitter yang tinggi, maka redaksi media massa pun menggunakan Twitter sebagai pintu masuk untuk mendalami isu yang berbuntut pada produksi berita (Rusadi, 2014). Tidak sampai di situ, Twitter pun digunakan sebagai medium distribusi pemberitaan oleh media yang bersangkutan (Paramastri dan Gumilar, 2019). Pemanfaatan *platform* Twitter juga digunakan sebagai wahana interaksi antara media dengan pengikutnya.

Penggunaan Twitter sebagai medium distribusi berita pun dinilai efektif guna mempermudah audiens mengakses pemberitaan terkait isu tertentu (Paramastri dan Gumilar, 2019). American Press Institute (2015) dalam rilis surveinya pun mengungkapkan bahwa 74 persen pengguna Twitter merupakan audiens dari media massa. Dimana lebih dari 4.700 pengguna media sosial yang menjadi responden survei, menyatakan bahwa di antara mereka menggunakan Twitter untuk mendapatkan berita lebih banyak dibandingkan dengan menggunakan sosial media lain.

Kaitannya di masa pandemi Covid-19, dimana masyarakat menghadapi situasi penuh ketidakpastian, masyarakat juga memerlukan informasi yang dapat dipertanggungjawabkan. Purnomo et al (2020) mengungkapkan bahwa masyarakat Indonesia lebih memperhatikan topik tentang Covid-19 hingga nilai pembaca melonjak sampai 45 juta pembaca di awal Januari 2020 pada portal berita Antaranews.com, Kompas.com, dan Detik.com. Kemudian nilai pembaca terekam mengalami peningkatan hampir dua kali lipat di bulan Maret yakni 95 juta, yang memang dibarengi dengan semakin gencarnya media dalam memberitakan kasus Covid-19 di Indonesia.

Berdasarkan Digital News Report yang dirilis oleh Reuters Institute (2020), dalam hal informasi mengenai virus corona maupun kondisi pandemi secara keseluruhan, masyarakat mempercayai institusi media dan pemerintah masing-masing negara dengan

persentase yang sama, yakni sebesar 59 persen. Kepercayaan publik terhadap sumber informasi mengenai Covid-19 terekam dalam survei yang dilakukan di enam negara yang terangkum dalam Gambar 1.3.



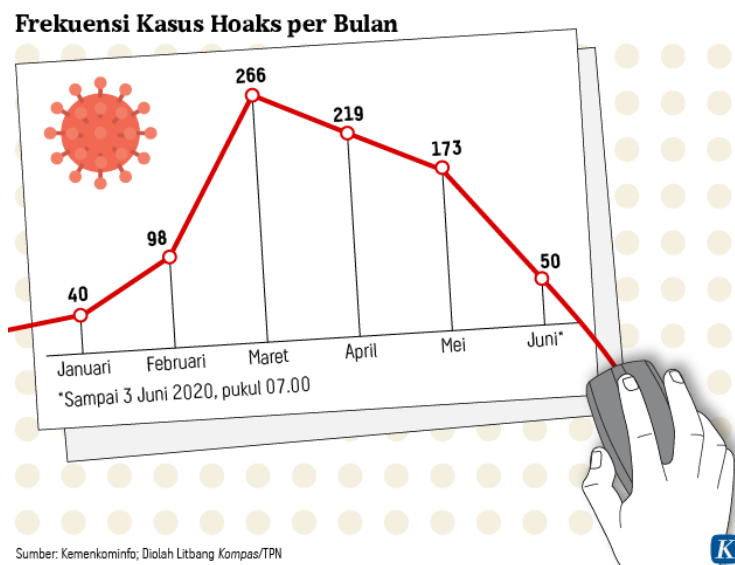
**Gambar 1.2 Kepercayaan Publik Terhadap Sumber Informasi Mengenai Covid-19**

Sumber: Reuters Institute, (2020).

Hasil survei menunjukkan bahwa pada rentang waktu puncak *lockdown* di beberapa negara, kepercayaan masyarakat terhadap institusi media meningkat hampir dua kali lipat dibanding mesin pencari maupun media sosial. Hal ini disebabkan maraknya disinformasi dan hoaks terkait Covid-19 yang terserak di media sosial sehingga masyarakat cenderung percaya terhadap pemberitaan di media arus utama (Reuters Institute, 2020).

Menelisik mengenai kasus hoaks terkait Covid-19, analisis Litbang Kompas yang disajikan dalam artikel Kompas.id pada 16 Juni

2020, menunjukkan sampai dengan pertengahan Juni, setidaknya terdapat 846 kasus isu hoaks terkait virus corona dan Covid-19 yang dirilis Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) sejak Januari 2020. Adapun pola karakter hoaks terklasifikasi setidaknya menjadi tiga topik terbanyak yakni dampak Covid-19, penularan Covid-19, dan pejabat terkait penanganan Covid-19.



**Gambar 1.3 Frekuensi Kasus Hoaks Terkait Covid-19**

Sumber: Kompas.id. 16 Juni 2020. Mengenali Karakter Hoaks Covid-19.

Mengatasi kesimpangsiuran informasi terkait Covid-19, diperlukan strategi komunikasi yang terarah dan mampu menjadi penerang bagi masyarakat. Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa Antonio Guterres dalam video menyambut hari kebebasan pers sedunia 2020, mengungkapkan bahwa pers merupakan obat penawar bagi pandemi misinformasi yang sedang terjadi di tengah pandemi Covid-19. Melalui berita dan analisis yang telah diverifikasi, ilmiah, dan berdasarkan fakta, pers bertindak sebagai obat penawar bagi gelombang kedua pandemi Covid-19, yaitu infodemi (*infodemic*). Infodemi diartikan sebagai situasi dimana berita bohong menyebar dengan lebih cepat dan mudah di dunia maya karena campur tangan manusia (Covid-19 Infodemics Observatory, 2020).

Media dapat menjadi penerang melalui fungsi edukasi kepada masyarakat. Fungsi tersebut dapat terwujud melalui penyampaian respon darurat kesehatan dan tidak memperburuk dengan melakukan pemberitaan yang sensasional (Chandra et al, 2011). Hal ini tentu dapat tercapai apabila mempertimbangkan prinsip-prinsip yang tertuang dalam Kode Etik Jurnalistik. Jika media menampilkan informasi yang akurat, berdasarkan fakta, dan terverifikasi, maka akan menjadi modal yang berharga bagi publik. Hal ini akan mendukung pernyataan Norris et. al. (2008) bahwa informasi dan komunikasi menjadi salah satu aspek yang berpengaruh ketahanan masyarakat.

Media yang dimaksud dalam penelitian ini adalah media arus utama (*mainstream media*). Media arus utama diantaranya adalah televisi, radio, surat, kabar, hingga media daring (*online*). Perbedaan media arus utama dengan media sosial menurut Mudjiyanto dan Dunan (2020) terletak pada pelibatan aturan dalam proses produksi sebuah berita. Pada media arus utama, melibatkan insan pers, perusahaan media, proses panjang dilakukan hingga sebuah informasi diberitakan kepada khalayak. Lain halnya dengan media sosial, dimana siapapun dapat menyebarkan informasi atas nama pribadinya melalui berbagai kanal.

Komunikasi publik selama masa darurat kesehatan, dalam hal ini pada masa pandemi Covid-19 di Indonesia, dilaksanakan oleh pemerintah pusat secara khusus melalui Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19, yang kemudian digantikan dengan Satuan Tugas Penanganan Covid-19 pada Juli 2020. Selanjutnya, informasi dikonstruksi melalui proses redaksi oleh masing-masing media yang meliput untuk disebarluaskan kepada masyarakat. Adapun peran media termasuk ke prinsip komunikasi risiko (*risk communication*) dalam strategi penanganan pandemi oleh WHO (WHO, 2019).

Komunikasi publik melalui pemberitaan media yang konstruktif pada masa krisis seperti pandemi dibutuhkan masyarakat sebagai

penerang. Pun strategi komunikasi pemerintah dalam mengelola informasi dan melakukan komunikasi publik yang cepat dan tepat. Böl (2011) mengungkapkan, apabila penanganan komunikasi publik dilakukan tanpa strategi yang tepat, potensi melemahnya kepercayaan masyarakat akan meningkat.

Di samping itu, kepercayaan publik terhadap pemerintah sebagai *leading sector* penanganan pandemi Covid-19 juga diperlukan untuk membangun ketahanan masyarakat di situasi penuh ketidakpastian. Hal ini diperkuat melalui riset yang dilakukan oleh Nuwayhid et al (2011), dimana kepemimpinan politik yang mendukung merupakan salah satu aspek yang berpengaruh dalam membangun dan mempertahankan resiliensi masyarakat.

Pemerintahan di berbagai negara menanggulangi keadaan krisis akibat Covid-19 dengan beragam cara. Indonesia dengan berbagai strategi dan kebijakan, melakukan pelonggaran PSBB sejak Juni 2020, menggunakan diksi normal baru (*new normal*) yang kemudian menjadi adaptasi kebiasaan baru. Namun, berbarengan dengan hal itu, penyebaran virus corona yang tetap masif membuat penerimaan terhadap adaptasi kebiasaan baru disikapi mendua, penuh kegamangan. Masyarakat seolah terbelah dalam dua kelompok besar, mereka yang optimistis dengan tata kehidupan baru dan mereka yang pesimistis menjalaninya (Kompas.id, 28 Juni 2020).

Situasi gamang dalam kondisi krisis dapat dengan mudah memicu adanya ketegangan dan konflik, baik antar aktor pemerintahan, pemerintahan dengan masyarakat, maupun di level masyarakat sendiri. Oleh sebabnya, pemerintah dituntut untuk dapat mereduksi potensi konflik akibat krisis melalui pengambilan kebijakan dan komunikasi risiko yang tepat (Weible & Heikkila, 2017). Peneliti mengangkat contoh situasi di bulan Januari dan Februari 2020 dimana marak pemberitaan mengenai komentar *nyeleneh* pejabat publik terkait ancaman virus corona menyebar ke Indonesia. Peran pers sebagai *watchdog* dan pilar

keempat demokrasi dapat dimaksimalkan pada fase ini untuk mengontrol kekeliruan narasi yang dibangun pemerintah guna meningkatkan mitigasi (Parahita, 2020).

Potret mengenai kepercayaan publik terhadap tata kelola penanganan Covid-19 sebetulnya telah terekam pada masa awal terkonfirmasi kasus Covid-19 di Indonesia, yakni Maret 2020. Melansir Publikasi Analisis Persepsi dan Emosi Publik Terhadap Penanganan #COVID19 Oleh Pemerintah (7-13 Maret 2020) yang dikaji oleh Drone Emprit, sebuah sistem analisis media sosial berbasis *big data*, ditemukan bahwa tren yang paling tinggi dari waktu ke waktu adalah menyoal kepercayaan (*trust*), baru kemudian terkejut (*surprised*), antisipasi (*anticipation*), ketakutan (*fear*), dan kemarahan (*anger*). Artinya, masalah kepercayaan justru menjadi sangat menentukan. Publik banyak berharap pemerintah bisa menyuguhkan data secara transparan, terukur, dan berbasis indikator ilmiah (Fahmi, 2020).

Pengaruh pemberitaan oleh media daring terhadap kepercayaan publik terhadap pemerintah juga ditemukan dalam penelitian yang dilakukan oleh Lu et al (2019). Lu et al menyebutkan bahwa pengguna internet yang mengumpulkan informasi media resmi dan situs jejaring sosial berbasis internet cenderung memiliki kepercayaan yang tinggi terhadap pemerintah.

*“Our findings also reveal that Internet users who gather information from newspapers, official media and social networking sites are more likely to trust governments, while those who gather information from independent blogs and foreign media are less trusting of government.”* (Liu et al, 2019)

Hubungan akses informasi melalui media massa dengan kepercayaan publik terhadap pemerintah berkaitan dengan sifat media massa yang dapat membentuk opini publik melalui konstruksi sosial. Konstruksi wacana yang disajikan oleh media massa menurut Eriyanto

(2002) setidaknya menimbulkan dampak menggiring khalayak pada ingatan tertentu dan memobilisasi massa melalui pembentukan opini.

Selain karena sifat media massa yang memungkinkan terjadinya pembentukan opini di masyarakat, konsumsi informasi bersumber dari media massa yang terserak di ruang digital seperti Twitter juga dipengaruhi oleh algoritma. Pariser (2011) menjelaskan bahwa data yang ditampilkan kepada seorang pengguna media sosial menyesuaikan dengan situs apa yang sering dikunjungi, komentar seperti apa yang sering disukai, dan berita-berita apa yang paling sering dibaca. Analisis kebiasaan-kebiasaan tersebut dilakukan oleh algoritma *website* sehingga individu akan terus secara otomatis mendapatkan informasi yang belum pernah dikonsumsi sesuai dengan preferensinya.

Adapun berdasarkan hasil Social Network Analysis (SNA) oleh Drone Emprit, untuk topik Covid-19 pada rentang waktu 7-13 Maret 2020 dimana merupakan pekan pertama Covid-19 terkonfirmasi di Indonesia, pembicaraan publik di Twitter dipengaruhi setidaknya oleh berbagai macam akun Twitter, baik akun pribadi, akun institusi media, maupun akun lembaga pemerintah melalui keterlibatan netizen dalam konten di Twitter (*engagement*) berupa *like*, *retweet*, dan *reply*. Lima akun teratas dengan *engagement* tertinggi yakni @CNNIndonesia dengan 24.978 *engagement*, @detikcom dengan 16.841 *engagement*, @TirtoID dengan 15.278 *engagement*, @whtvrcrizy dengan 11.418 *engagement*, dan @dirgarambe dengan 7.723 *engagement*. Data ini menunjukkan bahwa tiga akun teratas dengan *engagement* tertinggi merupakan akun media sosial organisasi media berbasis daring; CNN Indonesia, Detik.com, dan Tirto.id.

Berangkat dari fakta tersebut serta *gap* yang ada mengenai pengaruh pemberitaan di media terhadap kepercayaan publik, kemudian peneliti tertarik untuk mengkaji lebih jauh mengenai implikasi dari pemberitaan mengenai Covid-19, khususnya pemberitaan di media daring nasional terhadap ketahanan masyarakat ditinjau dari

kepercayaan publik terhadap pemerintah. Kepercayaan publik yang dimaksud dipotret melalui dinamika pembicaraan pengguna Twitter di Indonesia mengenai kebijakan pemerintah terkait Covid-19.

Twitter sebagai ruang publik memungkinkan terjadinya percakapan yang menghubungkan berbagai lapisan masyarakat. Fahmi dan Wibowo (2017) melalui riset yang dilakukannya menunjukkan temuan bahwa media sosial Twitter dapat dijadikan sebagai media komunikasi dua arah antara masyarakat dan pemerintah. Pertama, publik dapat mengetahui informasi terkait suatu kebijakan yang dilakukan lembaga pemerintah. Kedua, lembaga publik dapat mengakses informasi terkait apa yang menjadi perhatian publik terkait kebijakan dan isu yang berhubungan dengan lembaganya. Lebih dari itu, seperti halnya dipergunakan dalam proses produksi pemberitaan oleh lembaga pers, Twitter juga bisa menjadi sumber data yang dapat dimanfaatkan dalam proses penyusunan agenda kebijakan.

Kaitannya dengan suatu kebijakan, reaksi publik atas kebijakan pemerintah dapat terbagi antara setuju dan tidak setuju. Respon publik ini dapat dilihat melalui analisis sentimen yang direpresentasikan melalui perbincangan di media sosial terhadap suatu isu. Tendensi manusia untuk mengkategorikan dirinya dalam sebuah kelompok, termasuk *in-group* maupun *out-group* terhadap strategi kepemimpinan politik dapat dijelaskan menggunakan pendekatan interdisipliner (Masroor, 2019). Analisis identitas sosial digunakan untuk melihat bagaimana pemberitaan mengenai tata kelola penanganan Covid-19 disajikan oleh media online dan mempengaruhi opini netizen di Twitter. Lebih jauh penggunaan teori identitas sosial dalam penelitian ini akan melihat bagaimana aktivitas media mempengaruhi terbentuknya suatu identitas sosial.

Penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan *outcome* sebagai *early warning system* (EWS). Pencegahan konflik yang disebabkan oleh ketidakpercayaan publik terhadap pemerintah dapat dilakukan

melalui analisis media sebagai salah satu metode deteksi dini dengan memanfaatkan *open web data* dan *big data*. Letouzé et al (2013) mengungkapkan bahwa pemetaan krisis dapat menggunakan beberapa sumber termasuk pesan teks, *tweet*, dan artikel pemberitaan di media massa sebagai representasi visual dari *big data*.

## **1.2 Rumusan Masalah**

1. Bagaimana dinamika pemberitaan mengenai tata kelola penanganan Covid-19 pada daring di Indonesia selama masa transisi adaptasi kebiasaan baru?
2. Bagaimana publik dalam hal ini netizen Indonesia di Twitter menanggapi terpaan pemberitaan oleh media massa daring pada masa transisi adaptasi kebiasaan baru?
3. Bagaimana tanggapan publik mempengaruhi pengambilan kebijakan untuk menguatkan ketahanan masyarakat pada masa adaptasi kebiasaan baru?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

1. Mengidentifikasi dinamika pemberitaan mengenai tata kelola penanganan Covid-19 pada media daring di Indonesia selama masa adaptasi kebiasaan baru.
2. Menganalisis perbincangan publik di Twitter dalam menanggapi terpaan pemberitaan oleh media daring untuk mengidentifikasi kepercayaan publik terhadap pemerintah dalam menangani pandemi Covid-19.
3. Mengetahui pengaruh tanggapan publik terhadap pengambilan kebijakan untuk menguatkan ketahanan masyarakat pada masa adaptasi kebiasaan baru di tengah pandemi Covid-19.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini mengkaji keabsahan teori ketahanan masyarakat melalui peran media dalam mendukung maupun

menghambat aspek-aspek penguatan ketahanan masyarakat. Melalui penelitian ini diharapkan dapat memberikan kebaruan dalam khazanah studi Damai dan Resolusi Konflik melalui ketahanan masyarakat di masa krisis, yang sebelumnya telah diteliti oleh Nuwayhid et al (2011) melalui studinya pada masyarakat terdampak konflik di Lebanon, selama dan sesudah invasi oleh Israel. Di samping itu, penelitian ini diharapkan dapat memberi *outcome* berupa proyeksi *early warning system* terhadap potensi konflik yang disebabkan oleh kondisi krisis melalui analisis media.

## 2. Manfaat Praktis

Melalui penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi dalam peningkatan ketahanan masyarakat pada masa krisis melalui peran berbagai elemen di antaranya:

- a. Penguatan peran lembaga pemerintahan di bidang informasi dan komunikasi dalam mengkaji keamanan nasional melalui perspektif media.
- b. Peran jurnalisme sebagai penerang bagi masyarakat sekaligus sebagai *watchdog* dalam mengawasi kebijakan pemerintah terkait tata kelola penanganan krisis kesehatan.
- c. Menciptakan ruang digital yang damai dan kritis terutama di media sosial melalui literasi digital.